



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640  
[www.badilum.mahkamahagung.go.id](http://www.badilum.mahkamahagung.go.id), [ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 737/DJU/OT1.6/IV/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) surat  
Hal : Imbauan dalam Pembangunan  
Zona Integritas Menuju Wilayah  
Bebas Korupsi (WBK) di  
Lingkungan Peradilan Umum

Jakarta, 11 April 2025

Yth. Para Ketua Pengadilan Tinggi  
di seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 409/DJU/OT1.6/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 hal Penyampaian Informasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Peradilan Umum, dengan ini disampaikan:

1. Demi kelancaran dan tertibnya pengusulan Pengadilan Negeri Calon Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2025, diharapkan agar Pengadilan Tinggi mengirimkan daftar usulan Pengadilan Negeri Calon Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2025 di wilayah hukumnya yang memenuhi syarat sebagaimana dalam surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 409/DJU/OT1.6/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 **paling lambat tanggal 5 Mei 2025** disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (contoh terlampir) dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) manual yang diunggah melalui link [bit.ly/LkeManualPN](http://bit.ly/LkeManualPN)
2. Pengadilan Tinggi yang dapat diusulkan untuk meraih predikat WBK tahun 2025 sebanyak 7 (tujuh) unit kerja, yaitu:
  1. Pengadilan Tinggi Bengkulu
  2. Pengadilan Tinggi Banda Aceh
  3. Pengadilan Tinggi Makassar
  4. Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau
  5. Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
  6. Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat



7. Pengadilan Tinggi Papua Barat

Adapun Pengadilan Tinggi yang telah mengisi aplikasi PMPZI MA sampai dengan tanggal 11 April 2025 sebanyak 3 (tiga) unit kerja, yaitu:

1. Pengadilan Tinggi Bengkulu
  2. Pengadilan Tinggi Banda Aceh
  3. Pengadilan Tinggi Makassar
3. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2025 agar cermat dan teliti dalam melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dikarenakan berdasarkan hasil monitoring masih terdapat beberapa *evidence* yang tidak sesuai.
4. Pengadilan Tinggi Calon Unit Kerja Berpredikat WBK sebagaimana dalam angka 2 diharapkan menyelesaikan seluruh Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada aplikasi PMPZI MA **paling lambat tanggal 17 April 2025**, kecuali untuk LKE yang terkait Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) diselesaikan **paling lambat 30 April 2025**.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Para Ketua Pengadilan Negeri Calon Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2025.



Lampiran I  
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  
Nomor : 737/DJU/OT1.6/IV/2025  
Tanggal : 11 April 2025

**Contoh Format**  
**Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak**  
**Kesesuaian dan Kebenaran Data dan Informasi yang disampaikan dalam Evaluasi**  
**Zona Integritas**

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan pengusulan (nama satuan kerja) tahun 2025. Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (Nama jelas pejabat pimpinan satuan kerja)  
Jabatan : (Pimpinan satuan kerja)  
Alamat : (Alamat satuan kerja)

Menyatakan bahwa setiap data pendukung yang kami sampaikan terkait dengan:

1. Syarat pengusulan satuan kerja telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
2. Data dukung dan informasi pengisian LKE baik pada komponen pengungkit maupun komponen hasil telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika terdapat kondisi yang berbeda maka kami bersedia menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Tempat, tanggal)  
Pembuat Pernyataan,  
(Pimpinan satuan kerja)

Materai Rp 10.000,-

(Nama jelas pimpinan satuan kerja)

